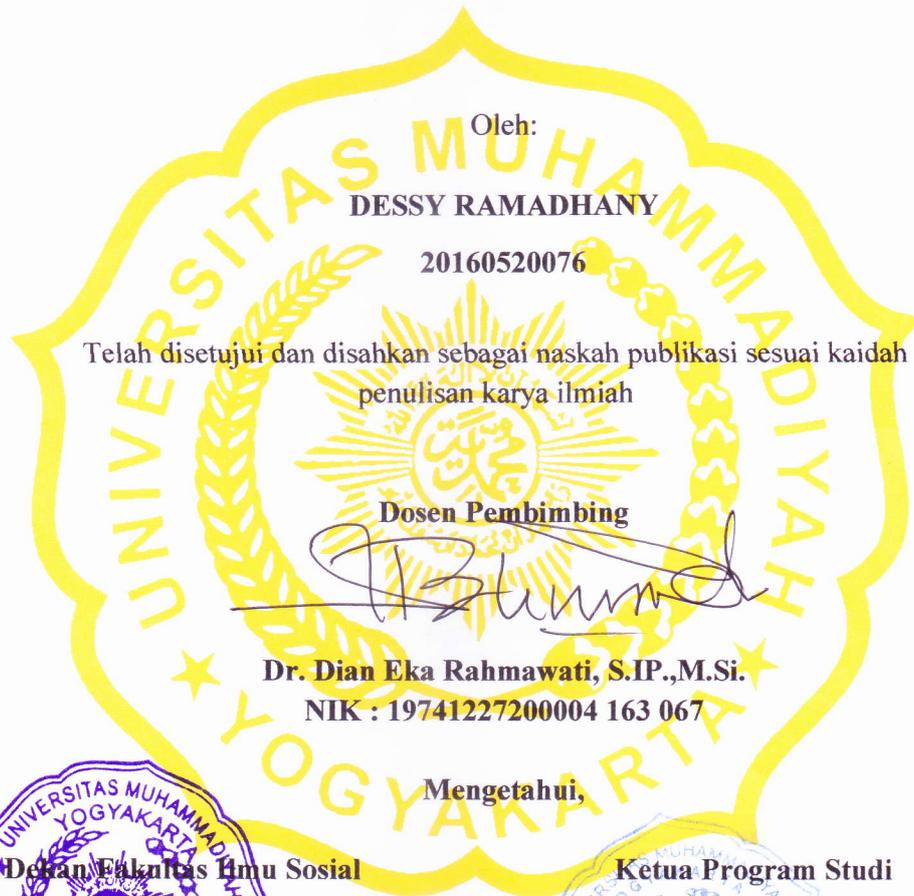


NASKAH PUBLIKASI

**MODALITAS CALON LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM PEMILU
2019 DI KABUPATEN SLEMAN**



Oleh:

DESSY RAMADHANY

20160520076

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing

Dr. Dian Eka Rahmawati, S.IP., M.Si.

NIK : 19741227200004 163 067

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik**

Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si

NIK: 19690822199603 163 038



**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si

NIK: 19660828199403 163 025

MODALITAS CALEG PEREMPUAN DALAM PEMILU LEGISLATIF 2019 DI KABUPATEN SLEMAN

Dessy Ramadhany¹, Dian Eka Rahmawati²

^{1,2}Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta

Email: dessyramadhany05@gmail.com

Abstract

This research aimed to know how the representation of women in 2019 elections in Sleman Regency and to know the factors that influence it. The theory used in this research is Capital Theory. Sleman Regency was chosen because it gained the most seats at 2019 election with 50 seat. 13 women were elected to DPRD, which is the highest number of women who passed the DPRD seat among other regencies in DI Yogyakarta. Method used in this research is descriptive qualitative. The number of respondent in this research were 8 people, consist of 4 women legislative candidates and 4 administrator from Nasdem, PKB, Golkar, and PDIP. Methods of data collection in this research is obtained by interviews and literature study. The result of this study indicate that the representation of women in election in Sleman Regency always increases from previous period. Where 2009 election with 10 seats, 2014 election with 12 seats, and increased again in 2019 with 13 seats. The 30% quota at the time of the nomination had been fulfilled by all parties, but in electability only 4 out of 8 parties that were able to fulfill the 30% quota, namely Gerindra, PKB, Nasdem, and PDIP. However, that quota only fulfilled at the time of nomination, not with the election in DPRD seat. There are 4 capital that must be owned by women legislative candidates to qualify to become the part of DPRD. The capital is sorted from the most influential in women representation is: 1) social capital, 2) economic capital, 3) political capital, and 4) symbolic capital. After doing research, there are several other factors that influence the selection of women in the 2019 election in Sleman Regency in addition to the 4 required capital mentioned. These factors are 1) Family. 2) incumbent's candidates, and 3) election system.

Keywords: Women's Participations In Politics, Modality, Political Parties.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi, dimana didalam terwujudnya demokrasi harus dilaksanakannya salah satu pilar utama dari sebuah akumulasi kehendak rakyat yang disebut pemilu atau lebih dikenal dengan pemilihan umum. Telah dijelaskan didalam Undang-Undang Nomr 7 Tahun 2017 Tentang

Pemilihan Umum Pasal 1 ayat 1: “Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Selama ini dunia politik sangat identik dengan dunia-nya laki-laki, kesetaraan dan keadilan *gender* masih belum optimal yang dapat dilihat pada kenyataan bahwa partisipasi perempuan pada jabatan-jabatan publik masih sangat minim dan memprihatinkan. Dapat dilihat pada proyeksi pertumbuhan penduduk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik dan United Nations Population Fund Indonesia pada tahun 2018 mencapai 265 juta jiwa. Dari jumlah yang sanbat banyak tersebut 131,88 juta jiwa berjenis kelamin perempuan. Namun, dengan jumlah yang sangat banyak tersebut, belum sesuai dengan jumlah representasi perempuan yang berada di lembaga-lembaga pembuat dan pengambil keputusan politik yang berada di Indonesia.

Akibat dari rendah dan minimnya representasi perempuan dalam bidang politik, dibuat undang-undang dari hasil perjuangan kaum perempuan yang memiliki sifat sementara untuk mendapatkan hak khususnya dibidang politik (*Affirmative action*) yaitu undang-undang Nomo 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum yang dijelaskan secara

implisit dalam pasal 65 Ayat (1):

“Setiap partai politik peserta pemilihan umum dapat mencalonkan DPR/DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.”

Pada satu sisi kebijakan kuota 30% tersebut sangat menguntungkan bagi perempuan, karena diharapkan mampu meningkatkan jumlah perempuan yang berpartisipasi dibidang politik dan juga pemenuhan hak-hak perempuan yang selama ini merasa diabaikan. Namun, disisi lain banyak perempuan yang dirasa belum siap dan mampu untuk terjun di dunia politik dan akhirnya partisipasi tersebut hanya bertujuan untuk memenuhi kuota 30% dari kebijakan yang sudah ditetapkan.

Tahun 2019 merupakan tahun yang menjadi pesta demokrasi Indonesia dimana warga Negara yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih dan menyalurkan hak suaranya untuk memilih wakilnya secara langsung untuk duduk di kursi DPR, DPRD dan memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Peneliti memilih Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu Provinsi yang melaksanakan pemilihan umum untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri memiliki 4 Kabupaten dan 1 Kota yaitu: Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul, Sleman dan Kota Yogyakarta. Peneliti memilih Kabupaten Sleman sebagai lokasi yang akan diteliti karena Kabupaten Sleman merupakan Kabupaten yang mendapatkan jatah kursi terbanayak dibandingkan dengan Kabupaten-Kabupaten yang lain di Provinsi DIY yaitu sebanyak 50

kursi. Selain itu, Kabupaten Sleman juga merupakan Kabupaten yang meloloskan paling banyak caleg perempuan menjadi DPRD dibandingkan dengan Kabupaten lainnya. Pemilihan Umum diikuti oleh 16 Partai Politik Nasional, dan 6 daerah pemilihan (Dapil), yaitu:

1. Sleman 1: Sleman, Turi, Tempel.
2. Sleman 2: Cangkringan, Ngaglik, Pakem.
3. Sleman 3: Ngemplak, Kalasan, Prambanan.
4. Sleman 4: Berbah, Depok.
5. Sleman 5: Mlati, Gamping.
6. Sleman 6: Seyegan, Godean, Moyudan, Minggir.

Pemilihan umum Kabupaten Sleman periode 2019-2024 diikuti oleh 546 calon legislatif, yang terdiri dari 244 caleg perempuan dan 302 caleg laki-laki. Kemudian caleg perempuan yang berhasil lolos pada pemilu tahun 2019 ini sebanyak 13 orang. Angka tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan yang cukup baik dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Pada tahun 2009 Kabupaten Sleman berhasil meloloskan caleg perempuan sebanyak 10 orang (20%) dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 12 orang (24%).

TABEL DPRD KABUPATEN SLEMAN 2009,2014 dan 2019.

No.	Keterangan	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019
1.	Jumlah Anggota DPRD perempuan Kabupaten Sleman	10 Kursi	12 Kursi	13 Kursi
Presentase		20%	24%	26%

Sumber: [Http://dprd.slemankab.go.id](http://dprd.slemankab.go.id) 2019

Pada penelitian kali ini peneliti ingin menunjukkan bagaimana Representasi Perempuan didalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman dengan adanya peraturan kuota perempuan sekurang-kurangnya 30% untuk setiap partai politik yang ingin mencalonkan anggota DPR/DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Karena, sampai saat ini keterpilihan perempuan didalam pemilu belum memenuhi kuota 30% tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2009 jumlah anggota DPRD Perempuan di Kabupaten Sleman hanya berjumlah 10 Orang. Namun, jumlah tersebut terus meningkat pada periode-periode selanjutnya yaitu 12 Orang pada tahun 2014 dan 13 Orang pada tahun 2019. Selain itu, peneliti juga akan menjelaskan modal-modal apa saja yang harus dimiliki oleh Calon Legislatif dan modal mana yang sangat berpengaruh dalam menentukan keterpilihan perempuan didalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. Penulis memilih 8 orang sebagai narasumber dalam penelitian ini, dimana terdiri dari 4 orang calon legislatif dan juga 4 orang dari pengurus masing-masing partai. 4 calon legislatif tersebut terdiri dari 2 caleg tidak terpilih dan 2 caleg yang terpilih dan berhasil lolos dalam pemilihan umum 2019 di Kabupaten Sleman. Caleg yang terpilih berasal dari PKB dan Nasdem serta yang tidak

terpilih berasal dari PDIP dan Golkar. Alasan penulis memilih PKB karena PKB mengusung caleg perempuan terbanyak, dan narasumber ini telah menjadi DPRD Kabupaten Sleman selama 3 periode berturut-turut, kemudian caleg dari partai Nasdem karena narasumber menjadi satu-satunya caleg perempuan dari Nasdem yang berhasil lolos dan juga menjadi DPRD Kabupaten Sleman selama 3 Periode berturut-turut. Selanjutnya yaitu caleg tidak terpilih dari partai Golkar karena partai Golkar masuk ke dalam partai yang mengusung caleg perempuan terbanyak namun tidak ada satupun yang berhasil lolos untuk menjadi DPRD Kabupaten Sleman, kemudian PDIP karena caleg perempuan terbanyak yang lolos menjadi DPRD Kabupaten Sleman dalam pemilu 2019 berasal dari partai ini dan narasumber mendapatkan suara terbanyak diantara caleg-caleg lain yang tidak lolos dari PDIP.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berbentuk kata-kata tertulis, atau lisan dan juga perilaku dari orang yang dapat diamati (Moleong, 2009). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana representasi perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Sleman dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi representasi perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Sleman dilihat melalui teori modalitas. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yang telah ditetapkan didalam penelitian ini dan juga menggunakan studi pustaka .

Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, meliputi:

- a. Pengumpulan data yaitu kegiatan mengumpulkan data yang dibutuhkan selama penelitian.
- b. Reduksi data yaitu pengumpulan kasar data-data yang ada dilapangan, reduksi data dapat dilakukan dengan cara membuat ringkasan.
- c. Penyajian data yaitu penyajian yang telah menggambarkan keadaan secara singkat dengan data yang telah diringkas dan disajikan didalam laporan yang telah disusun secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami.
- d. Menarik kesimpulan penelitian data yang telah diperoleh dan yang telah direduksi untuk kemudian dibuat dalam bentuk laporan dengan cara membandingkan, menghubungkan, dan juga memilih data yang mengarah pada permasalahan sehingga mampu menjawab permasalahan yang ada dan menghasilkan kesimpulan yang valid.

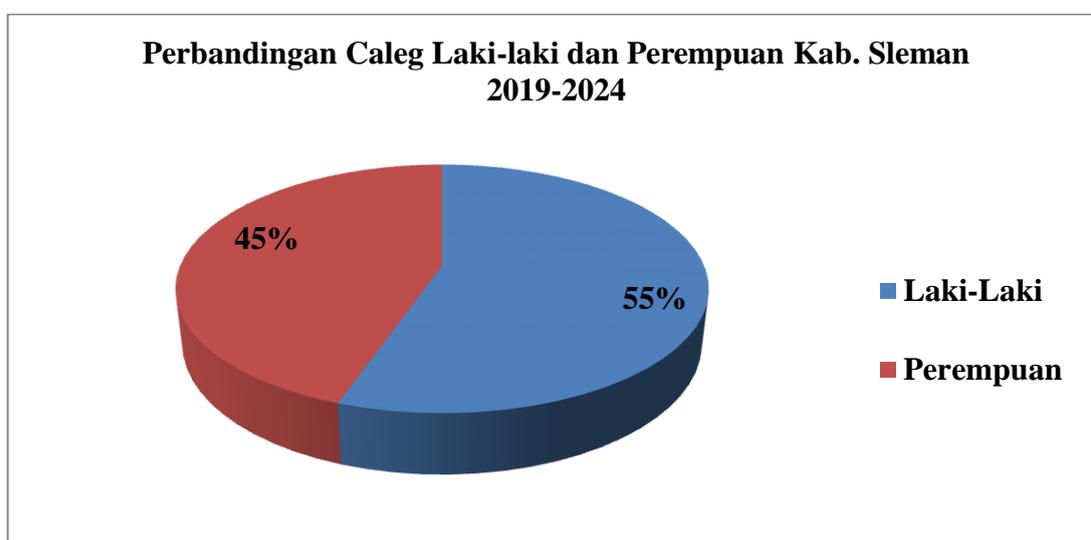
C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Representasi Perempuan Didalam Pemilu 2019 Di Kabupaten Sleman

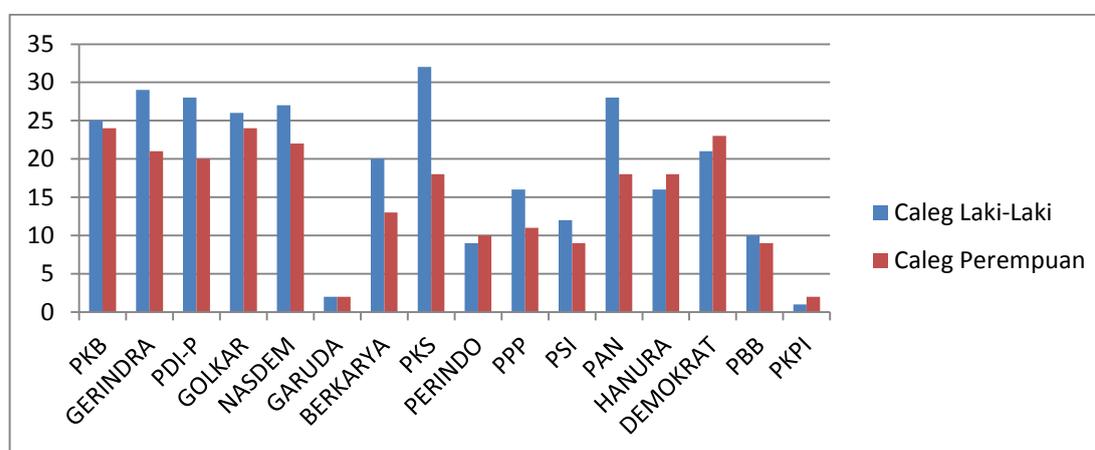
Tingkat representasi perempuan di Kabupaten Sleman dalam pemilihan umum terkhusus di pemilihan calon legislatif, dalam tiga periode terakhir selalu meningkat. Pada tahun 2009 terdapat 10 kursi yang diperoleh oleh perempuan atau sekitar 20%, di periode selanjutnya yaitu tahun 2014 meningkat kembali menjadi 12 kursi atau sekitar 24%. Dan yang terakhir pemilihan umum yang baru saja dilakukan yaitu periode 2019 representasi perempuan didalam Pemilihan Umum ini kembali meningkat menjadi 13 kursi atau sekitar 26%. Meskipun jumlah tersebut belum

memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan yang berhasil mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Sleman. Namun, hal tersebut sudah menjadi pencapaian yang sangat baik karena mampu meningkatkan jumlah keterwakilan tersebut. Meningkatnya jumlah keterwakilan perempuan yang ikut didalam pemilihan umum 2019 di Kabupaten Sleman ini dapat dikatakan akibat dari ketentuan kebijakan kuota 30% perempuan di wilayah politik.

Tabel Perbandingan Caleg Laki-Laki dan Perempuan di Kabupaten Sleman



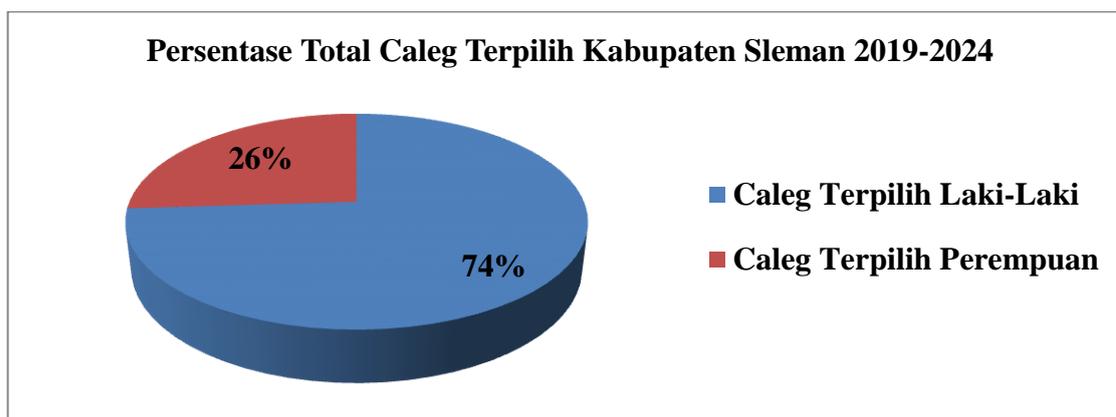
Perbandingan Antara Calon Legislatif Perempuan dan Laki-Laki di Kabupaten Sleman



Dapat dilihat dari kedua data diatas bahwa semua partai yang menjadi peserta pemilu 2019 di Kabupaten Sleman sudah memenuhi kuota 30% untuk perempuan, bahkan ada beberapa partai yang melebihi dari 30%. Selain itu, untuk keseluruhan caleg perempuan sudah melebihi dari 30% yaitu mencapai angka 45%. Meskipun, jumlah laki-laki masih lebih banyak dibandingkan perempuan yaitu sebesar 55%. Namun, hal tersebut sudah menunjukkan hasil yang sangat baik karena perempuan sudah melebihi kuota yang telah ditentukan dalam peraturan dan hal tersebut juga menunjukkan bahwa minat perempuan untuk terjun kedalam dunia politik sudah semakin meningkat.

Tabel Calon Legislatif Perempuan Yang Berhasil Lolos Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Sleman Periode 2019-2024

No.	Nama	Jabatan	Asal Partai
1.	Ani Maeranti,ST	Ketua Komisi A	PKB
2.	Rahayu Widi Nuryani,SH.,MH	Anggota Komisi C	PKB
3.	Rahayu Widi Cahyani, SH.,MH	Sekretaris Komisi B	PKB
4.	Happy Brilliant Srikandy	Anggota Komisi A	Gerindra
5.	Tri Mulia Wijayanti S.ST	Anggota Komisi D	Gerindra
6.	Dara Ayu Suharto,SH	Anggota Komisi B	Gerindra
7.	B. Ari Murruti, SE	Anggota Komisi B	PDIP
8.	Nila Rifianti,S.Pd	Anggota Komisi C	PDIP
9.	Benedicte Rury Tyas Pramuri, SE	Anggota Komisi D	PDIP
10.	Sri Riyadiningsih, S.Pd	Anggota Komisi A	PDIP
11.	Hj. Ismi Sutarti,SH	Anggota Komisi C	Nasdem
12.	Hj. Sumaryatin,S.Sos.,MA	Anggota Komisi A	PKS
13.	Fika Chusul Chotimah,SH	Anggota Komisi D	PPP

Gambar Persentase Total Caleg Terpilih Kabupaten Sleman 2019-2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 13 perempuan yang lolos didalam pemilihan umum dan mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Sleman, 3 perwakilan dari PKB, 3 perwakilan dari Gerindra, 4 perwakilan dari PDIP yang merupakan perwakilan terbanyak, kemudian 1 Perwakilan dari Nasdem, PKS dan juga PPP. 7 dari 13 perwakilan merupakan calon legislatif incumbent dan 6 lainnya adalah orang-orang baru yang diusung oleh partai untuk ikut serta dalam pemilihan umum DPRD Kabupaten Sleman dan berhasil mendapatkan kursi.

Dalam pencalonan caleg perempuan semua partai sudah memenuhi persyaratan yaitu memasukkan 30% kuota perempuan bahkan ada beberapa partai yang melebihi dari 30%, namun dilihat dari grafik selanjutnya bahwa hanya 4 dari 8 partai yang mampu memenuhi kuota 30% perempuan didalam keterpilihan menjadi anggota DPRD di Kabupaten Sleman. Partai hanya memenuhi kuota 30% dalam pencalonan tetapi tidak didalam keterpilihan. Partai yang mampu memenuhi kuota 30% tersebut adalah partai Gerindra, PPP, PKB dan juga Nasdem. 4 partai lainnya

yaitu PAN, PDIP, PKS, dan Golkar belum mampu memenuhi kuota 30% dalam keterpilihan. Bahkan PDIP sebagai partai yang meloloskan paling banyak caleg perempuan hanya berada di angka 27% dan belum mampu mencapai angka 30% keterpilihan.

Pada tabel kedua dapat dilihat bahwa jika di presetasikan keseluruhan jumlah caleg perempuan yang berhasil lolos hanya berada di angka 26% dan tidak mencapai 30% yang berarti bahwa ketentuan kuota 30% tersebut hanya dapat dipenuhi pada saat pencalonan saja jika dilihat dari keseluruhan anggota perempuan, terlihat sangat jauh selisihnya antara caleg perempuan dan caleg laki-laki yang berhasil lolos menjadi anggota DPRD Kab. Sleman pada Periode 2019-2024.

2. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keterwakilan Perempuan didalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman

Dalam penelitian ini menggunakan 4 teori modalitas yang harus dimiliki oleh calon legislatif untuk dapat terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Sleman periode 2019-2024.

1. Modal Sosial

Modal sosial merupakan modal yang penting dalam mempengaruhi keterwakilan perempuan didalam pemilihan umum 2019 di Kabupaten Sleman. Dimana modal ini menduduki peringkat pertama yang sangat berpengaruh dalam keterwakilan dan juga keterpilihan caleg di pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sleman. Indikator yang sangat

berpengaruh adalah jaringan dan kekuatan pengaruh didalam masyarakat. dimana jaringan bisa membantu caleg untuk mendapatkan dan mengumpulkan massa serta pengaruh didalam masyarakat mampu memberikan ketertarikan masyarakat untuk memilih caleg tersebut. Dilihat dari sistem pemilihan umum sekarang yang terbuka, caleg harus mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dari masyarakat untuk dapat lolos dan mendapatkan kursi di DPRD. Dua caleg terpilih dari partai PKB dan Nasdem mengandalkan modal sosial sebagai kekuatan utama dalam pemilihan umum 2019 di Kabupaten Sleman. Karena, dua caleg ini merupakan caleg incumbent dan sudah memiliki basis massa yang cukup banyak dibandingkan caleg yang tidak terpilih. Selain itu caleg dari partai Nasdem juga menjadi salah satu pengurus partai politik dan memiliki jabatan sebagai Wakil Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan, ini menjadi nilai tambah bagi caleg tersebut.

2. Modal Politik

Modal politik yang menjadi salah satu faktor keterwakilan perempuan didalam pemilu 2019 di Kabupaten Sleman dapat ditarik kesimpulan bahwa modal politik merupakan modal yang sangat berpengaruh. Dari beberapa cakupan yang telah dijelaskan hanya pengalaman mengorganisasi massa yang memiliki pengaruh besar terhadap keterwakilan dan keterpilihan caleg dalam pemilihan umum.

3. Modal Ekonomi

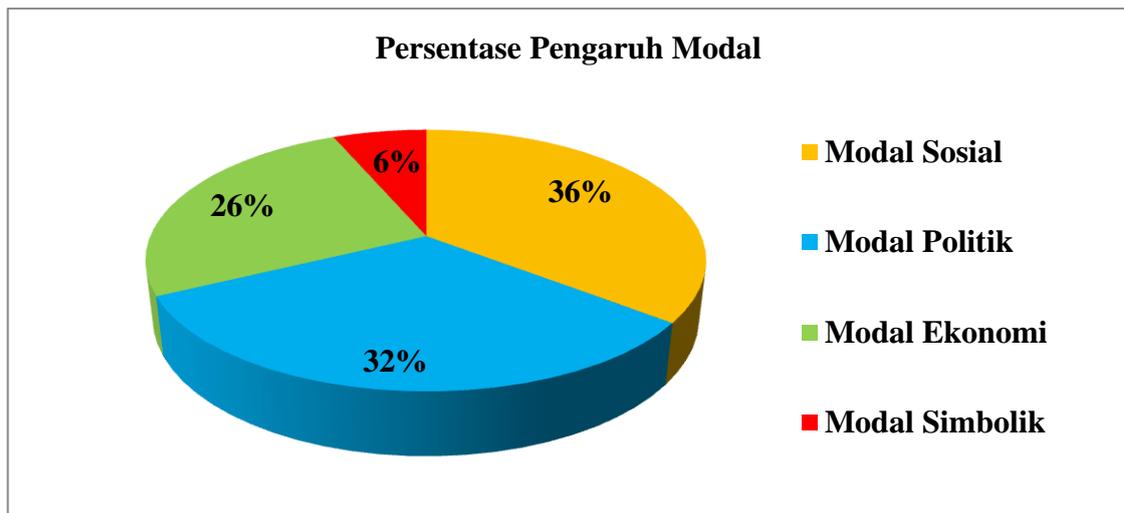
Modal ekonomi ini juga penting, selain adanya jaringan modal ekonomi dibutuhkan karena cost politik yang sangat tinggi. Namun modal ekonomi ini hanya menjadi modal pendukung bagi kedua caleg terpilih. Karena, kedua caleg terpilih tersebut sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat disebabkan karena sudah pernah menjadi anggota DPRD di periode sebelumnya sehingga lebih mengandalkan modal sosial. Sedangkan, Dari satu caleg yang tidak terpilih dalam pemilihan umum, mengatakan bahwa modal ekonomi yang menjadi penyebab caleg tersebut tidak terpilih. Tidak bisa dipungkiri lagi dengan sistem pemilihan umum yang terbuka ini, mengharuskan caleg untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya agar bisa terpilih. Namun, dengan modal ekonomi yang minim mengakibatkan kecilnya peluang caleg untuk terpilih dan lolos menjadi DPRD. Namun pendapat yang berbeda diberikan oleh caleg dari PDIP dimana narasumber lebih mengandalkan modal yang lain, modal ekonomi menurut narasumber hanya 15% saja jika dibandingkan dari modal-modal lain yang dimiliki.

4. Modal Simbolik

Modal simbolik tidak memiliki pengaruh yang besar dalam keterwakilan perempuan dan juga keterpilihan perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. Namun, terdapat satu responden yang menjadikan modal simbolik sebagai salah satu modal yang dapat diandalkan yaitu Ibu Sri Haryani dari partai PDIP karena caleg ini

berprofesi sebagai Dosen dan memiliki gelar pendidikan yang cukup tinggi. Modal simbolik hanya menjadi nilai tambahan untuk beberapa caleg saja.

Gambar Presentase Modal



Setelah diakumulasikan dari hasil wawancara dengan beberapa caleg yang dipilih sebagai responden dapat ditarik kesimpulan bahwa, modal satu dengan modal lainnya saling berkaitan. Caleg tidak akan lolos dan terpilih menjadi anggota DPRD jika hanya memiliki satu modal saja atau dua modal saja, karena modal tersebut saling melengkapi. Seorang caleg tidak akan bisa lolos jika hanya memiliki modal sosial saja, harus didukung oleh modal politik dan juga modal ekonomi. Jika diurutkan berdasarkan data diatas, maka:

1. Modal sosial
2. Modal politik
3. Modal ekonomi

4. Modal simbolik

Dan setelah dilakukannya penelitian ternyata terdapat beberapa faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi keterwakilan dan keterpilihan perempuan didalam Pemilu 2019 di Kabuptaen Sleman selain dari beberapa modal yang disebutkan diatas, yaitu:

1. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan faktor yang sangat penting. Karena ketika perempuan telah memutuskan untuk terjun ke dunia politik maka perempuan tersebut harus siap untuk menerima segala resiko termasuk resiko untuk menghabiskan waktunya mengurus urusan politik.

2. Caleg Incumbent

Selain faktor keluarga, faktor yang tak kalah penting dan berpengaruh adalah caleg incumbent dan juga sistem yang terbuka dengan suara terbanyak. karena dapat dilihat dari 13 caleg perempuan yang terpilih. Terdapat 7 caleg yang sebelumnya merupakan anggota DPRD Periode 2014-2019. Caleg incumbent ini memiliki nilai tambahan tersendiri karena kebanyakan masyarakat sudah mengenal dan sudah memberikan kepercayaannya terhadap caleg-caleg yang sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota DPRD. Selain itu Caleg incumbent juga sudah memiliki massa dan jaringan yang cukup banyak karena sudah terlebih dahulu terjun ke dunia pencalegan. Namun, hal tersebut tidak menjadikan caleg yang baru mencalonkan tidak bisa lolos menjadi

DPRD. Dari data yang terdapat di web DPRD juga bisa dilihat bahwa ada beberapa caleg yang sebelumnya pernah terpilih namun di periode 2019-2024 ini tidak terpilih kembali.

3. Sistem Pemilu

Untuk sistem suara terbanyak seperti yang diberlakukan sekarang juga menjadi faktor keterpilihan caleg perempuan, karena ternyata sistem nomor urut lebih menguntungkan bagi perempuan. Jika dengan sistem nomor urut perempuan memiliki peluang yang lebih besar untuk lolos menjadi DPRD. Selain itu dengan sistem terbuka dengan suara terbanyak juga dianggap memiliki cost politik yang lebih mahal.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah dijelaskan didalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Representasi perempuan didalam pemilu tahun 2019 mengalami peningkatan dari periode-periode sebelumnya, dan hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran perempuan akan politik sudah cukup bagus. Di Kabupaten Sleman terdapat 244 calon legislatif perempuan yang mengajukan diri, dan yang lolos menjadi anggota DPRD Kabupaten Sleman pada periode 2019-2024 berjumlah 13 orang yang berasal dari 6 partai yaitu PKB, Gerindra, PDIP, Nasdem, PKS dan PPP.

- b. Terdapat 4 (empat) modal yang harus dimiliki oleh calon legislatif untuk dapat terpilih didalam pemilihan umum, dan jika diurutkan modal tersebut yaitu : (1). Modal Sosial, (2). Modal Politik, (3). Modal Ekonomi , (4). Modal Simbolik.
- c. Selain dari modal-modal yang harus dimiliki oleh Calon Legislatif, terdapat juga beberapa faktor yang mempengaruhi terpilih atau tidaknya Calon Legislatif yaitu : (1). Keluarga, (2). Caleg Incumbent, (3). Sistem Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Amalia, L. S. (2009). Marjinalisasi Perempuan Dalam Politik Pada Pemilu 2009. *Jurnal Masyarakat Indonesia* , 489
- Ardiansa, D. (2017). Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia. *Jurnal Politik*, 2(1), 71. <https://doi.org/10.7454/jp.v2i1.82>
- Ayu Putu Nantri, S. (1945). *PEREMPUAN DAN POLITIK*. 105(3), 129–133.
- BUDIARJO, P. M. (2008). *DASAR-DASAR ILMU POLITIK*. JAKARTA: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bourdieu, p. 1986. “The Form Of Capital” dalam J.G. Richardson (ed.) *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. New York: Greenwood Press, hlm. 241-258.
- Dian Eka Rahmawati, M. D. (2018). *Power Contestation on Marriage Age Discourse in dealing with Islamic Values: A Case Study on Nahdatul Ulama*. *Jurnal Studi Pemerintahan*, Vol. 9 No. 1.
- Efendi David, 2014. politik elite muhammadiyah,(studi tentang fragmentasi elite muhammadiyah), Yogyakarta
(Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2009)
- Indra Kertati. (2014). *Implementasi kuota 30 persen keterwakilan politik perempuan di parlemen*. 8(1), 19–32.
- Kurniawan, N. (2014). Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008. *Jurnal Konstitusi*, 11(4), 714–736.
- Mukarom, Z. (2008). Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 9(2), 257–270. <https://doi.org/10.29313/mediator.v9i2.1125>
- Mulyono, I. (2010). *Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan*. 1–6. Retrieved from http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/makalah_STRATEGI_MENINGKATKAN_KETERWAKILAN_PEREMPUAN__Oleh-_Ignatius_Mulyono.pdf
- Pamungkas, S. (2011). *PARTAI POLITIK . Teori dan Praktik di Indonesia*.

Pangestika Rusadi Putri, S. S. (2012). Participation of women according to Law No 8 year 2012 about the election of DPR RI, DPD, DPRD in Semarang City. *Экономика Региона*, (8).

PROF.A. MUKHTIE FADJAR, S. (2012). *PARTAI POLITIK DALAM PERKEMBANGAN KETATANEGARAAN INDONESIA*. Malang: Setara Press.

Putnam, Robert D. 1993. *The Prosperous Community: Sosial Capital and Public Life*. The American Prospect No. 13 Spring.

Website:

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2009). *Peserta Pemilu*.

Dipetik Oktober Kamis, 2019, dari KPU DIY:
<https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/dapil/view>

<http://kab-sleman.kpu.go.id/kpu-slemankab.html>

<http://www.slemankab.go.id/>

<https://slemankab.bps.go.id/subject/12/kependudukan>.

<https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-4301827/jumlah-dpt-dan-tps-pemilu-2019-di-sleman-bertambah>

<https://dprd.slemankab.go.id/>

<https://databoks.katadata.co.id/>

<https://partainasdem.id/pages/visi-misi>

<https://pdiperjuangan.id/article/category/child/27/Partai/Visi-dan-Misi>

<https://pkb.id/page/visi-misi/>

<https://www.golkar.or.id/visi-misi-golkar>

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012